

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2018-2020**

**Laporan Tugas Akhir**



**Disusun Oleh :**

**Dwi Yulianto**

**19212008**

**Program Studi Akuntansi Program Diploma III**

**Fakultas Bisnis dan Ekonomika**

**Universitas Islam Indonesia**

**2022**

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2018-2020**

**Laporan Tugas Akhir**

**Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat  
menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika**

**Universitas Islam Indonesia**

**Disusun Oleh :**

**Dwi Yulianto**

**19212008**

**Program Studi Akuntansi Program Diploma III**

**Fakultas Bisnis dan Ekonomika**

**Universitas Islam Indonesia**

**2022**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam mengelola anggaran pendapatan dan anggaran belanja tahun anggaran 2018-2020 dengan menggunakan analisis kinerja keuangan pemerintah. Dalam melakukan analisis ada dua varian yang digunakan, yakni varian pendapatan dan varian belanja. Dalam melakukan analisis terdapat beberapa teknik yang digunakan pada setiap varian, pada varian pendapatan adapun teknik yang digunakan yakni pertumbuhan PAD, rasio kemandirian, rasio efektifitas dan efisiensi PAD, sedangkan pada varian belanja teknik yang digunakan adalah pertumbuhan belanja dan rasio efisiensi belanja. Dari perhitungan analisis tersebut menggambarkan pertumbuhan Kabupaten Boyolali rata-rata setiap tahunnya mengalami peningkatan, dengan kategori kemandirian yang sangat rendah, dalam melakukan realisasi sangat efektif namun kurang efisien. Sedangkan pada belanja setiap tahunnya juga mengalami peningkatan namun masih rasional dan dapat dipertanggungjawabkan, realisasi anggaran masih efisien namun adapun belanja yang tidak terrealisasi dengan baik.

**Kata Kunci : Kinerja Keuangan, Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah, Varian Pendapatan dan Belanja, Pertumbuhan dan Rasio**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2018-2020**



**Disusun Oleh :**

**Nama : Dwi Yulianto**  
**No. Mahasiswa : 19212008**  
**Program Studi : Akuntansi Program Diploma III**

**Telah di setujui oleh Dosen Pembimbing**

**Pada tanggal : 22 Juni 2022**



## PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar saya sanggup menerima hukuman sangsi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku”

Yogyakarta, 14 Juli 2022

Penulis



Dwi Yulianto

## KATA PENGHANTAR

*Assalamualaikum Wr, Wb*

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir dengan baik. Tidak lupa pula Shalawat serta Salam penulis curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang kelak nantinya kita mendapatkan syafaatnya di Yaumul Qiamah rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas izinnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2018-2020”

Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini yang merupakan salah satu syarat kelulusan di Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Bisnis Dan Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penulisan Tugas Akhir ini penulis banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan terkait pembuatan sehingga penulis sukses menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih banyak kepada semua pihak terkait yang telah membantu selama penulisan menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2018-2020” kepada :

1. ALLAH SWT yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam melakukan penyusunan Tugas Akhir.

2. Bapak Purwanto, S.H. selaku Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali
3. Ibu Novita Ekasari, S. STP. M.Si. selaku Kepala Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali.
4. Bapak Budi Suparjo, S.E. Selaku Pembimbing *Counterpart* di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali
5. Seluruh Staf Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali.
6. Bapak Syah Budiningsih, S.H. MM. selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pembiayaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali.
7. Seluruh Staf Bidang Akuntansi dan Pembiayaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali.
8. Ibu Dra. Marfuah, M.Si., Ak., CA., Cest. SAP selaku Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
9. Ibu Dra. Marfuah, M.Si., Ak., CA., Cest. SAP selaku Dosen Pembimbing yang berkenaan untuk memberikan bimbingannya serta saran dalam menyelesaikan Tugas Akhir Ini.
10. Seluruh Staf Dosen Diploma III Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
11. Ibu, Bapak, Kakak, dan Keluarga yang telah memberikan Doa, Motivasi, serta Tenaganya.

12. Sahabat-sahabat Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, dan Pramuka yang telah memberikan Doa, Motivasinya.
13. Sahabat-sahabat Kelas Akuntansi A Angkatan 2019 yang telah menemani selama 3 Tahun perkuliahan, dan dukungannya.
14. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penulisan Tugas Akhir ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.

Dalam menyusun Laporan tugas Akhir ini penulis menyadari bahwasannya masih memiliki banyak kekurangan, kesalahan, kekhilafan dan jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik, dan saran demi kesempurnaan Tugas Akhir ini, serta penulis mohon maaf atas kekurangan dari Tugas Akhir ini. Dengan segala kerendahan hati penulis, berharap Laporan Tugas akhir ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pembaca dan pihak-pihak yang bersangkutan

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Boyolali, 26 Juni 2022



Dwi yulianto



## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Pernyataan Bebas Penjiplakan .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi .....	vii
Daftar Tabel .....	ix
Daftar Lampiran .....	x
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan Penulisan .....	5
1.4. Manfaat Penulisan .....	6
<b>BAB II : Landasan Teori .....</b>	<b>7</b>
2.1. Laporan Keuangan Daerah.....	7
2.1.1. Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	7
2.1.2. Komponen Laporan Keuangan .....	7
2.1.3. Tujuan laporan Keuangan .....	14
2.2. Analisis Laporan Keuangan .....	15
2.2.1. Pengertian Analisis Laporan Keuangan .....	15
2.2.2. Prosedur dan Teknik Analisis Laporan Keuangan .....	15
2.2.3. Perhitungan Analisis Pertumbuhan dan Analisis Rasio .....	19
2.3. Kinerja Keuangan .....	23
2.3.1. Pengertian Kinerja Keuangan .....	23
2.3.2. Informasi yang Digunakan untuk Pengukuran Kinerja .....	24
2.3.3. Tujuan dan manfaat Penilaian Kinerja .....	27

BAB III : ANALISIS DESKRIPTIF .....	29
3.1 Data Umum .....	29
3.1.1 Gambaran Umum Badan Keuangan Daerah .....	29
3.2 Data Khusus .....	31
3.2.1 Pembahasan .....	31
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN .....	39
4.1 Kesimpulan .....	39
4.2 Saran .....	39
Daftar Pustaka .....	41
LAMPIRAN .....	42



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kreteria Rasio Kemandirian .....	21
Tabel 2.2 Kreteria Rasio Efektifitas PAD .....	22
Tabel 2.3 Kreteria Rasio Efisiensi PAD .....	23
Tavel 3.1 Hasil Analisi Rasio Pertumbuhan PAD .....	31
Tabel 3.2 Hasil Analisis Rasio Kemandirian .....	32
Tabel 3.3 Hasil Analisis Rasio Efektifitas PAD .....	33
Tabel 3.4 Hasil Analisis Rasio Efisiensi PAD .....	35
Tabel 3.5 Hasil Analisis Rasio Pertumbuhan Belanja .....	36
Tabel 3.6 Hasil Analisis Rasio Efisiensi Belanja.....	38

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 .....	42
Lampiran 2 : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 .....	43
Lampiran 3 : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 .....	44
Lampiran 4 : Bagan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali .....	45
Lampiran 5 : Surat Keterangan Selesai Pelaksanaan Kegiatan Magang.....	46



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun (2014), mengenai Pemerintah Daerah dimana kewenangan pemerintah dalam mengatur pemerintahannya. Dijelaskan bahwa “Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sesuai dengan asas otonomi, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kegiatan pemerintah daerah secara mandiri dan transparan termasuk dibidang keuangan. Didalam Peraturan Bupati No 25 Tahun (2018) menjelaskan bahwasannya Badan Keuangan Daerah (BKD) mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan menjadi kewenangan daerah. Dalam struktur organisasi Badan Keuangan Daerah bidang akuntansi dan pembiayaan sebagai akuntabilitas pemerintah mempunyai tanggungjawab kepada hasil dari pengelolaan laporan keuangan daerah yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah suatu media atau alat bagi pemerintah sebagai pengendali serta evaluasi kerja bagi bagi pemerintah secara keseluruhan dan unit-unit didalamnya serta sebagai media untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangan kepada publik secara luas (Kartopawiro & Susanto, 2018). Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) merupakan pendoman pengeluaran dan penerimaan dalam rangka

pelaksanaan otonomi daerah, struktur APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan dan Pembiayaan daerah. Komponen terpenting dari APBD yang jadi perhatian masyarakat daerah adalah pendapatan daerah dan belanja daerah, karna masyarakat mempunyai peran penting dalam penerimaan pendapatan daerah dan belanja daerah yang salah satunya terdapat pada pajak.

Masyarakat berkepentingan dalam mengetahui pengelolaan atau penggunaan dari dana tersebut. karna tujuan dari laporan keuangan pemerintah daerah sendiri adalah sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah setempat, pengukuran kinerja pemerintah harus fokus pada target dan sasaran program kerja yang dibuat sehingga diharapkan meningkatnya efisiensi penyediaan layanan publik, pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan dalam mewujudkan akuntabilitas publik (Farida & Maulana Nugraha , 2019). Maka dari itu perlu dilakukan sebuah penilaian kinerja pemerintah guna melihat perkembangan pemerintah sudah berjalan dengan baik atau tidak. Karna kegiatan oprasional merupakan kegiatan yang paling menonjol dalam penilaian kinerja pemerintahan untuk menghasilkan pendapatan asli daerah serta melakukan belanja. Dari hasil penilaian kinerja Pemerintah nantinya dapat menjadi sebuah tolak ukur pemerintah di periode berikutnya dalam pengalokasian sumber daya dan keputusan, serta mewujudkan pertanggungjawaban kepada publik dan memperbaiki kelembagaan pemerintahan (Nugroho , 2019).

Dalam menilai sebuah kinerja pemerintah daerah dapat dilakukan melalui analisis. Teknik yang digunakan adalah analisis hubungan, analisis perbandingan dan, analisis rasio. Salah satu metode untuk menganalisis Laporan Keuangan

Pemerintah daerah (LKPD) pada Laporan Realisasi Anggaran dengan menggunakan metode analisis rasio dan analisis pertumbuhan. Karena pada dasarnya analisis menurut Mahmudi, (2019) mengimplementasikan sebuah angka yang menggambarkan sebuah makna yang digunakan seseorang untuk menentukan sebuah keputusan. Secara garis besar Kabupaten Boyolali realisasi pendapatan daerah selama periode 2018 sampai dengan 2020 mengalami peningkatan diketahui pendapatan daerah tahun 2018 sebesar Rp. 2.382.403.220.150 meningkat 5,82% di tahun 2019 menjadi Rp. 2.357.487.210.573 dan meningkat 5,82% di tahun 2020 menjadi Rp. 2.382.403.220.150. dengan presentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah 16% pertahun. Sedangkan pengeluaran untuk belanja daerah setiap tahunnya juga mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar Rp. 2.203.112.762.252 meningkat 8,10% di tahun 2019 menjadi Rp. 2.468.421.561.000 dan meningkat 1,75% di tahun 2020 menjadi Rp. 2.339.805.517.025. Keuangan pemerintah kabupaten boyolali di tahun 2018 dan 2020 mengalami surplus sedangkan di tahun 2019 mengalami defisit. Data tersebut diperkuat dengan opini BPK “Wajar Tanpa Pengecualian”

Rasio yang dapat digunakan dalam menganalisis laporan Keuangan Pemerintah daerah kabupaten Boyolali sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah
2. Rasio Kemandirian
3. Rasio Efektifitas PAD dan Rasio Efisiensi PAD
4. Pertumbuhan Belanja
5. Rasio Efisiensi Belanja

Masing-masing diantaranya mempunyai makna yang tersendiri untuk menggambarkan sebuah kondisi keuangan pemerintahan mulai dari acuan untuk menilai tingkat pertumbuhan PAD, kemandirian keuangan pemerintah dalam menghasilkan pendapatan PAD dalam APBD, mengukur efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintah dalam merealisasikan PAD, dan kemampuan pemerintah dalam penggunaan anggaran belanja, maka dalam penelitian ini penulis sangat tertarik melakukan penelitian mengenai “ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2018-2020”. Nantinya dalam penelitian ini dilakukan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Penelitian ini sangat penting untuk menilai suatu kinerja keuangan pemerintahan dalam membelanjakan PAD secara efektif dan efisien.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari data yang sesuai dengan judul Tugas Akhir ini, serta latar belakang yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan rumusan masalah yang dapat dibahas adalah

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Boyolali diukur dengan pertumbuhan PAD ?
2. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Boyolali diukur dengan rasio kemandirian ?
3. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Boyolali diukur dengan rasio efektifitas dan efisiensi PAD ?



4. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Boyolali diukur dengan pertumbuhan belanja ?
5. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Boyolali diukur dengan rasio efisiensi belanja ?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini sesuai judul penulis dan latar belakang yang telah diuraikan antara lain:

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Boyolali diukur dengan pertumbuhan PAD
2. Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Boyolali diukur dengan rasio kemandirian
3. Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Boyolali diukur dengan rasio eketifitas dan efisiensi PAD
4. Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Boyolali diukur dengan pertumbuhan belanja
5. Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Boyolali diukur dengan rasio efisiensi belanja

#### **1.4 Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut diantaranya :

1. Bagi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali

Dapat menjadi bahan tolak ukur dalam mempertimbangkan dalam melakukan kebijakan anggaran serta bahan evaluasi untuk mengoptimalkan potensi-potensi unggulan untuk menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali untuk tahun berikutnya.

2. Bagi Pembaca dan peneliti selanjutnya

Menambah wawasan mengenai perkembangan kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Boyolali selama tahun 2018 sampai dengan 2020, menambah sumbangan pemikiran mengenai ilmu akuntansi khususnya dalam menganalisis laporan keuangan pemerintahan dan juga sebagai bahan referensi maupun sebagai acuan dalam melakukan penyusunan Tugas Akhir.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

##### **2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Fahmi (2016) laporan keuangan adalah suatu laporan informasi yang menggambarkan suatu kondisi atau keadaan keuangan suatu entitas dan lebih dalam lagi informasi tersebut dapat dijadikan suatu tolak ukur untuk menilai kinerja keuangan suatu entitas dalam suatu periode tertentu. Sedangkan laporan keuangan pemerintah daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun (2010) adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan, entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang didalamnya terdapat dari satu atau lebih entitas akuntansi yang dimana nantinya harus wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan di periode tertentu yang dapat digunakan untuk kepentingan instansi atau publik. Dari kedua pengertian laporan keuangan tersebut dapat disimpulkan bahwasannya laporan keuangan adalah suatu gambaran atau keadaan suatu instansi perusahaan atau pemerintahan yang didalamnya memuat suatu informasi kinerja instansi di periode tertentu.

##### **2.1.2 Komponen Laporan Keuangan**

Dalam penyusunan laporan keuangan daerah terdapat beberapa komponen yang harus ada didalamnya, komponen tersebut sudah ditetapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP 01) adapun beberapa komponen sebagai berikut :

## 1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran adalah kegiatan keuangan pemerintah pusat atau daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN atau APBD. Dalam laporan realisasi anggaran didalamnya menyajikan ihtisar sumber, alokasi penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pusat atau daerah dalam periode pelaporannya, yang terdapat unsur-unsur pendukungnya antara lain:

- 1) Pendapatan LRA
- 2) Belanja
- 3) Transfer
- 4) Surplus/Defisit LRA
- 5) Pembiayaan
- 6) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

Laporan realisasi anggaran juga merupakan juga menggambarkan perbandingan anggaran yang telah dirancang oleh pemerintah daerah dengan realisasi yang diterima oleh pemerintah daerah.

## 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan perubahan saldo anggaran lebih didalamnya lebih banyak menyajikan secara komperensif mengenai data periode-periode sebelum pos-pos sebagai berikut antara lain :

- 1) Saldo Anggaran Lebih Awal
- 2) Penggunaan Saldo Anggran Lebih
- 3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan
- 4) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahunan Sebelumnya dan lain-lain

### 5) Saldo Anggaran Lebih Akhir

## 3. Neraca

Neraca adalah gambaran umum posisi keuangan suatu entitas pelapotan yang didalamnya memuat mengenai:

### 1) Aset

Di dalam neraca asset dibagi menjadi 2 bagian antara lain sebagai berikut:

#### A. Aset Lancar

Kategori aset lancar adalah ketika aset tersebut diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan atau kurang dari 1 tahun sejak tanggal pelaporan aset tersebut dan aset lancar berupa kas dan setara kas

#### B. Aset Tidak Lancar

Aset tidak lancar dapat diklasifikasikan sebagai investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya yang dimangsutkan untuk dimiliki atau digunakan lebih dari 12 bulan atau lebih dari 1 tahun.

##### a. Investasi jangka panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki atau dipergunakan selama lebih dari 12 bulan atau lebih dari 1 tahun. didalam Investasi Jangka panjang dibagi menjadi 2 yakni(investasi non permanen dan investasi permanen)

##### b. Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan atau lebih dari 1 tahun yang biasanya digunakan

oleh masyarakat. misalkan (tanah, peralatan dan mesin, gedung atau bangunan, jalan, irigasi, jaringan dan aset tetap lainnya)

c. Dana Cadangan

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan berasal dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali (DAK, pinjaman daerah, dan lainnya)

2) Kewajiban

Didalam neraca kewajiban dibagi menjadi 2 antara lain sebagai berikut:

A. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar kurang dari 12 bulan atau kurang dari 1 tahun setelah tanggal pelaporan. Contoh dari kewajiban jangka pendek misalnya (utang transfer pemerintah, utang kepada pegawai, bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, dan bagian utang dari utang jangka panjang)

B. Kewajiban Jangka Panjang

Suatau entitas pelaporan tetap akan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang meskipun pembayaran dapat diselesaikan kurang dari 12 bulan atau kurang dari 1 tahun.

### C. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan pemerintah yang berasal dari selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporannya.

#### 4. Laporan Operasional (LO)

Laporan operasional adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan iktisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah dan kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan. Pos-pos yang disajikan dalam laporan operasional antara lain sebagai berikut:

- 1) Pendapatan LO dari kegiatan operasional
- 2) Beban dari kegiatan operasional
- 3) Surplus/defisit dari kegiatan non operasional
- 4) Pos luar biasa surplus/defisit LO

Dalam hubungannya dengan laporan operasional, suatu kegiatan entitas pelaporan dapat dianalisis menurut klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

#### 5. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama 1 periode akuntansi atau 1 tahun kalender, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Didalam arus kas terdapat penjabaran mengenai klasifikasi sebagai berikut antara lain:

#### 1) Aktiva Operasi

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintahan selama satu periode akuntansi. Dalam arus kas operasi ini adalah salah satu indikator yang menunjukkan pemerintah dalam menghasilkan kas untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah di masa yang akan datang.

#### 2) Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang bermaksud untuk melepas dan mendapatkan aset tetap serta investasi lainnya. Tujuan dari kegiatan investasi sendiri adalah untuk menunjang dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat setempat dimasa yang akan datang agar masyarakat terjamin dan sejahtera.

#### 3) Aktivitas Pendanaan

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang bersangkutan dengan adanya pemberian piutang jangka panjang atau pelunasan kewajiban jangka panjang yang berpengaruh terhadap perubahan jumlah piutang jangka panjang dan kewajiban jangka panjang.

#### 4) Aktivitas Transitoris

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam ke tiga aktivitas diatas antara lain aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Didalam aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan pemerintah. Adapun



contoh kegiatan dari transaksi Transitoris misalnya ( Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), penerimaan atau pemberian kembali uang persediaan kepada bendahara pengeluaran, kiriman uang PFK contohnya tespen dan askes)

#### 6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi terkait kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya, dalam laporan perubahan ekuitas menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- 1) Ekuitas awal
- 2) Surplus/defisit LO pada periode bersangkutan.
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan dan koreksi kesalahan mendasar
- 4) Ekuitas akhir

Nantinya suatu penyajian entitas pelapor disajikan lebih lanjut pada laporan perubahan ekuitas dalam catatan atas laporan keuangan.

#### 7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan menjeaskan secara naratif atau terperinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan modal, anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas.

### 2.1.3 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan pemerintah menurut (PSAP 01) adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayanya, dengan cara:

1. Menyajikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintahan.
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas.
3. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
4. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan menandai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhannya.
5. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintahan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
6. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam menandai aktivitasnya.
7. Laporan keuangan pemerintah dimangsutkan untuk digunakan oleh umum yang mempunyai peran prediktif dan prospektif, guna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang digunakan dalam kegiatan operasional yang berkelanjutan.

## **2.2 Analisis Laporan Keuangan**

### **2.2.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan**

Menurut Fahmi (2016) analisis laporan keuangan adalah suatu cara untuk melakukan perbandingan jumlah, dari jumlah satu dengan jumlah lain pada komponen laporan keuangan dengan harapannya akan menemukan sebuah jawaban untuk dijadikan pengambilan sebuah keputusan. Sedangkan menurut Mahmudi, (2019) analisis laporan keuangan adalah metode atau teknik untuk mengimplementasikan angka angka dalam laporan keuangan sehingga memberikan sebuah makna tertentu bagi seseorang yang ingin melakukan pengambilan sebuah keputusan. Dari kedua pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasannya laporan keuangan adalah suatu kegiatan untuk membandingkan laporan keuangan dari beberapa periode akuntansi mulai dari tahun ini, tahun sebelumnya, dan tahun yang akan datang dimana digunakan menjadi suatu tolak ukur untuk pengambilan suatu keputusan.

### **2.2.2 Prosedur dan Teknik Analisis Laporan Keuangan**

Didalam menganalisis suatu laporan keuangan tidak semata-mata hanya menganalisis tanpa adanya atauran atau prosedur serta teknik yang ditempuh saat melakukan analisis, adapun prosedur yang harus ditempuh sebelum menganalisis laporan keuangan menurut (Mahmudi, 2019)

1. Prosedur Analisis Laporan Keuangan
  - 1) Menilai kinerja makro pada laporan keuangan
  - 2) Menilai kinerja program atau kegiatan dari pemerintah daerah

- 3) Menilai kinerja keuangan pemerintah daerah dengan analisis
  - 4) Melakukan analisis laporan keuangan.
2. Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan

Adapun metode serta tehnik yang harus dilakukan saat melakukan analisis laporan keuangan, metode serta teknik yang dapat digunakan antara lain sebagai berikut:

1) Metode Vertikal

Analisis vertikal apabila laporan keuangan yang akan dianalisis menggunakan satu periode laporan keuangan saja, dengan cara membandingkan antara pos-pos yang berada di dalam laporan keuangan tersebut, dengan tujuan hanya untuk menilai perkembangan pada periode itu saja.

2) Metode Horizontal

Analisis Horizontal merupakan metode analisis dengan cara melakukan perbandingan laporan keuangan untuk beberapa periode akuntansi, sehingga menghasilkan atau menggambarkan suatu perkembangan pada suatu intansi, biasanya metode ini juga disebut dengan metode dinamis. Didalam metode horizontal terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan

A. Teknik Perbandingan

Teknik perbandingan adalah metode teknik dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau lebih, dan juga bisa membandingkan dengan entitas lain.

## B. Teknik Trend

Analisis trend adalah suatu metode atau teknik yang digunakan untuk mengetahui tendensi dari pada keadaan keuangannya, apakah entitas menunjukkan tendensi tetap, naik atau turun.

## C. Common Size

Common size adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui presentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap total aktiva, dan juga untuk mengetahui permodalan yang dihungkan dengan jumlah penjualannya.

## D. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja

Analisis sumber dan penggunaan modal kerja adalah suatu analisi suatu sumber-sumber yang masuk dan penggunaan dari modal kerja atau apa saja yang mempengaruhi perubahan dari modal kerja itu sendiri.

## E. Analisis Sumber dan Penggunaan Kas

Analisis sumber dan penggunaan kas adalah suatu analisi suatu sumber-sumber yang masuk dan penggunaan dari kas atau apa saja yang mempengaruhi perubahan dari kas itu sendiri.

## F. Analisis Rasio

Analisis rasio adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan dari pos-pos yang berada di laporan keuangan secara individu atau kombinasi.

#### G. Analisis Perubahan Laba Kotor

Analisis perubahan laba kotor adalah suatu analisis untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor suatu perusahaan dari periode akuntansi keperiode akuntansi yang terdahulu atau masa yang akan datang .

#### H. Analisis Break Even

Analisis break even adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai atau sebuah target yang harus dipenuhi oleh entitas agar entitas tersebut tidak mengalami kerugian tetapi juga belum memperoleh keuntungan.

Sedangkan untuk teknik analisis laporan keuangan pemerintahan itu dibagi empat adapun teknik laporan keuangan pemerintah menurut (Mahmudi, 2019) sebagai berikut:

##### A. Analisis Varians

Teknik analisis varian digunakan untuk menganalisis realisasi anggaran, dengan cara mengevaluasi selisih yang terjadi antara anggaran dengan realisasi. Didalam mengevaluasi selisih terdapat 2 jenis selisih yakni selisih menyenangkan dan tidak menyenangkan.

##### B. Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan digunakan untuk membandingkan antara dua angka yang diambil dari elemen laporan keuangan. Dari analisis rasio keuangan nanti dari hasilnya akan mengimplementasikan atau

menggambarkan perkembangan kinerja dari tahun periode akuntansi dengan tahun-tahun yang lain.

#### C. Analisis Pertumbuhan

Analisis pertumbuhan digunakan untuk mengetahui kecenderungan baik berupa kenaikan atau penurunan kinerja pada satu periode akuntansi. biasanya digunakan untuk mengetahui perkembangan aset pendapatan, utang dan lain sebagainya.

#### D. Analisis Regresi

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui variable independen terhadap variable dependen. Biasanya analisis register digunakan untuk menguji pengaruh likuiditas keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat serapan APBD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, dan lain sebagainya.

### **2.2.3 Perhitungan Analisis Pertumbuhan dan Analisis Rasio**

Dalam menganalisis sebuah laporan keuangan keuangan pemerintah daerah ada beberapa macam-macam teknik yang dapat digunakan salah satunya teknik analisis pertumbuhan dan teknik analisis rasio, menurut Mahmudi, (2019) berikut komponen teknik yang dapat digunakan dalam menganalisis laporan keuangan:

#### 1. Analisis Pertumbuhan

##### 1) Analisis Pertumbuhan PAD

Analisis pertumbuhan PAD adalah analisis untuk mengetahui pertumbuhan pendapatan asli daerah dalam tahun yang bersangkutan atau beberapa periode anggaran mengalami pertumbuhan pendapatan secara

positif ataupun negative, jika positif menunjukkan bahwasannya pertumbuhan pendapatan mengalami trend atau peningkatan sedangkan negatif maka pertumbuhan pendapatan mengalami penurunan sehingga pemerintah daerah harus mencari penyebab apa yang timbul dari penurunan pendapatan tersebut, untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Boyolali diukur dengan pertumbuhan PAD, adapun perhitungan pertumbuhan PAD dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD Thn } t - \text{Realisasi PAD Thn } t-1}{\text{Realisasi PAD Thn } t-1} \times 100\%$$

## 2) Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja adalah analisis yang digunakan pemerintah dalam mengetahui perkembangan belanja dari tahun-ketahun, dimana pertumbuhan belanja mengukur masing-masing belanja dimana apakah tingkat pertumbuhan belanja pemerintah daerah masih rasional dan dapat dipertanggungjawabkan, adapun perhitungan pertumbuhan belanja dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Pertumbuhan Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Thn } t - \text{Realisasi Belanja Thn } t-1}{\text{Realisasi Belanja Thn } t-1} \times 100\%$$

## 2. Analisis Rasio

### 1) Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian adalah rasio yang dihitung dengan cara membandingkan antara penerimaan Pendapatan Asli Daerah di bagi dengan jumlah pendapatan transfer ditambah dengan jumlah pendapatan dari pusat serta pinjaman daerah. Dari hasil rasio nantinya akan



menunjukkan semakin tinggi angka rasio maka semakin tinggi kemandirian keuangan daerah yang dihasilkan, adapun perhitungan rasio kemandirian dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli daerah}}{\text{Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman}} \times 100\%$$

Nilai rasio kemandirian dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Kreteria Rasio Kemandirian**

Kemampuan Keuangan	Presentase	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 - 25%	Instruktif
Rendah	25 - 50%	Konsultif
Sedang	50 - 75%	Partipatif
Tinggi	75 -100%	Delegatif

Sumber Kepmendagri No. 690.900.327(1996)

## 2) Rasio Efektifitas dan Efisiensi PAD

### A. Rasio Efektifitas

Rasio efektifitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan pengarahannya atau melakukan aktivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan yang ingin ditargetkan. Dalam menghitung rasio efektifitas dengan cara membandingkan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan target penerimaan atau anggaran penerimaan Pendapatan Asli daerah, adapun cara perhitungan rasio efektifitas dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Nilai rasio efektifitas dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 2.2 Kreteria Rasio Efektifitas**

Kreteria Efektifitas	Presentase
Sangat Efektif	>. 100%
Efektif	100%
Cukup Efektif	90% - 99%
Kurang Efektif	75% - 89%
Tidak Efektif	< 75%

Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327(1996)

Dalam melakukan analisis kinerja keuangan pemerintah dalam melaksanakan aktivitas penerimaan Pendapatan Asli daerah menggunakan analisis rasio efektifitas saja kurang, karna jika hanya dilihat dari efektifitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah apabila sudah baik atau bisa dikatakan sangat efektif belum tentu dalam menjalankan untuk mendapatkan hasilnya atau penerimaan Pendapatan Asli Daerah sudah efisien. Maka dari itu juga dilakukannya analisis rasio efisiensi

#### B. Rasio Efisiensi PAD

Rasio efisiensi adalah perhitungan dengan cara membandingkan antara biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah dengan realisasi Pendapatan Asli daerah, adapun cara perhitungan rasio efisiensi dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Biaya Pemerolehan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Apabila semakin kecil rasio tersebut maka semakin efisien kinerja pemerintahan dalam mendapatkan atau memungut Pendapatan Asli Daerah, adapun nilai efisiensi yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

**Tabel 2.3 Kriteria Efisiensi**

Kreteria Efektifitas	Presentase
Tidak Efisien	>. 100%
Kurang Efisien	90% - 100%
Cukup Efisien	80% - 90%
Efisien	60% - 80%
Sangat Efisien	< 60%

Sumber Kepmendagri No. 690.900.327(1996)

### 3) Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja adalah rasio yang membandingkan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja, dimana rasio tersebut akan digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan penghematan anggaran yang dikeluarkan. Dalam mengukur rasio ini tidak ada patokan yang baku karena bersifat relatif dari tahun ketahun jika diatas 100% maka terindikasi melakukan pemborosan dan sebaliknya maka pemerintah daerah dapat menekan biaya yang dikeluarkan, adapun cara perhitungan rasio efisiensi dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisa Biaya Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

## 2.3 Kinerja Keuangan

### 2.3.1 Pengertian Kinerja Keuangan

Menurut Mardiasmo (2018) Pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik untuk menilai pencapaian suatu strategi dengan melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sedangkan menurut Mahmudi (2015) pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan

sebelumnya, informasi efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, perbandingan antara hasil kegiatan dengan target, serta efisiensi tindakan dalam mencapai tujuan. Pengukuran kinerja bermangrut untuk menilai suatu kondisi keadaan keuangan perusahaan atau intansi dalam suatu periode tertentu dimana nantinya dapat melihat bagaimana progress perusahaan atau intansi dalam mendapatkan serta mengalokasikan dana tersebut sesuai dengan anggaran yang telah dibuat sebelumnya apakah telah sesuai dengan target/anggaran yang sudah ditetapkan atau tidak.

### **2.3.2 Informasi Yang Digunakan Untuk Pengukuran Kinerja Keuangan**

Dalam menentukan sebuah kinerja keuangan pastinya harus ada alat untuk mengukur suatu kinerja keuangan pemerintah sudah berjalan dengan baik atau belum, adapun informasi untuk mengukur suatu kinerja keuangan menurut Mardiasmo (2018) antara lain sebagai berikut:

#### **1. Informasi Finansial**

Penilaian kinerja keuangan finansial diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat sebelumnya, penilaian ini dilakukan dengan menggunakan analisis varian yakni selisih dan perbedaan antara aktual dengan anggaran.

Analisis varian yang dapat digunakan adalah:

##### **1) Varian Pendapatan**

Klasifikasi varian pendapatan meliputi tiga komponen yakni (pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah) antara lain sebagai berikut

#### A. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber asli daerah, dengan pembagian kelompok sebagai berikut

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah Yang Dipisahkan
- d. Lain-Lain PAD Yang Sah

#### B. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan otoritas pemerintah setingkat pusat dan provinsi, adapun kategori pendapatan transfer sebagai berikut:

- a. Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan
- b. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, meliputi
- c. Transfer Pemerintah Provinsi

#### C. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah merupakan pendapatan yang dikelompokkan dalam jenis pendapatan bantuan dana kontijensi atau penyeimbang dari pemerintah dan dana darurat, kategori dari lain-lain pendapatan yang sah meliputi:

- a. Pendapatan Hibah
- b. Pendapatan Dana Darurat
- c. Pendapatan lainnya.

## 2) Varian Pengeluaran

Varian pengeluaran adalah varian dari gambaran sebuah transaksi pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk melaksanakan suatu aktivitas, adapun varian pengeluaran sebagai berikut

### A. Varian Belanja Rutin

Varian belanja rutin juga sering disebut belanja operasional dimana kegiatan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari kegiatan pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

### B. Varian Investasi atau Modal

Varian investasi atau modal juga sering disebut belanja modal dimana pengeluaran anggaran guna memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat jangka panjang

## 2. Informasi Non Finansial

Penilaian kinerja keuangan non finansial sendiri berfokus pada teknik kinerja yang komperatif dan sering dikembangkan oleh organisasi-organisasi besar yakni Balanced Scorecard, disini tidak hanya berdasarkan aspek finansial saja namun ditambah dengan aspek non finansial.

Metode Balance Scorecard terdapat empat aspek disalamnya antara lain:

- 1) Prespektif Finansial
- 2) Prespektif Kepuasan
- 3) Prespektif Efisien Proses Internal
- 4) Prespektif Pembelajaran dan Pertumbuhan.

Jika informasi finansial berjalan dengan baik sudah pastinya kinerja keuangan juga berjalan dengan baik karna jenis informasi finansial adalah jenis informasi yang menjadikan tolak ukur kesuksesan kinerja keuangan .

### **2.3.3 Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah daerah**

Dimana setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh sebuah pemerintahan sudah pasti memiliki sebuah tujuan untuk mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya, untuk menilai sukses atau tidaknya sebuah target tergantung bagaimana keadaan masyarakat setempat apakah sudah mendapatkan kenikmatan yang diberikan oleh pemerintah daerah sebagai upaya mensejahterakan masyarakat. Dari kinerja suatu pemerintahan, adapun tujuan dan manfaat didalamnya menurut Mardiasmo (2018) tujuan dan manfaat pengukuran kinerja keuangan sebagai berikut:

1. Adapaun tujuan dari pengukuran kinerja sektor publik
  - 1) Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik
  - 2) Untuk mengukur kinerja finansial dan non finansial secara tertimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strateginya.
  - 3) Sebagai alat untuk mencapai keputusan berdasarkan individual dan kemampuan kolektif yang rasional
  - 4) Penilaian kinerja pada sektor publik bertujuan untuk:
    - A. Untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintahan.
    - B. Untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
    - C. Untuk mewujutkan penanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

## 2. Manfaat Penilaian Kinerja.

Adapun manfaat dari penilaian kerja terutama untuk sebuah pemerintahan kedepannya sebagai berikut:

- 1) Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan menilai kinerja manajemen.
- 2) Menunjukkan arah capaian target kinerja yang telah ditetapkan.
- 3) Memonitor dan mengevaluasi kinerja dengan membandingkan skema kerja dan pelaksanaannya.
- 4) Membantu mengungkap dan memecahkan masalah yang ada.
- 5) Membantu memahami proses kegiatan intansi pemerintahan.



## **BAB III**

### **ANALISIS DESKRIPTIF**

#### **3.1 Data Umum**

##### **3.1.1 Gambaran Umum Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali**

Badan Keuangan Boyolali beralamat di Wonosari, Kemiri, Kec. Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Terkait dengan uraian tugas dan fungsi masing-masing bidang Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Boyolali di atur pada Peraturan Bupati No 50 tahun (2018) tentang “Uraian Tuga Jabatan Pada Badan Keuangan daerah Kabupaten Boyolali” di pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwasannya “Badan keuangan Daerah mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah, dekonsentrasi, dan tugas pembantu di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah yang menjadi kewenangan daerah”.

Dalam menjalankan otonomi daerah Badan keuangan Daerah Boyolali dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dimana mempunyai tugas dan wewenang untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas serta urusan pemerintahan kabupaten Boyolali mengenai tugas sebagai pembantu bidang pendapatan, pengelolaan, keuangan dan asset daerah Boyolali. Yang nantinya kepala dinas akan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah (SEKDA). Adapun struktur organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekertariat, terdiri dari :
  - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - 2) Subbagian Keuangan.
  - 3) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.
3. Bidang Pajak Daerah, terdiri dari :
  - 1) Subbidang Pelayanan.
  - 2) Subbidang Pendapatan dan Penetapan.
  - 3) Subbidang Penagihan.
4. Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah, terdiri dari :
  - 1) Subbidang Pengendalian Oprasioanal Pendapatan.
  - 2) Subbidang Dana Transfer dan Pendapatan Lain-lain.
5. Bidang Anggaran, terdiri dari :
  - 1) Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  - 2) Subbidang Pembinaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Daerah.
  - 3) Subbidang Evaluasi Administrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Bidang Akuntansi dan Pembiayaan, terdiri dari :
  - 1) Subbidang Pembukuan dan Pelaporan Keuangan.
  - 2) Subbidang Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Keuangan.
7. Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah, terdiri dari :
  - 1) Subbidang Pembendaharaan.
  - 2) Subbidang Pengelolaan Kas Daerah.

8. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, terdiri dari :
  - 1) Subbidang Penatausahaan Aset Daerah.
  - 2) Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah.
  - 3) Subbidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah.
9. Unit Pelaksana Teknis
10. Kelompok Jabatan Fungsional

### 3.2 Data Khusus

#### 3.2.1 Pembahasan

##### 1. Pertumbuhan PAD

Pertumbuhan PAD menggambarkan bagai mana kondisi secara umum pendapatan asli daerah yang terealisasi apakah mengalami peningkatan atau penurunan pada setiap periodenya yang, adapun hasil analisis pertumbuhan PAD kabupaten Boyolali sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Hasil Analisis Pertumbuhan PAD**

Tahun	Realisasi PAD Tahun Berjalan	Realisasi PAD Tahun Sebelumnya	Naik (Turun)	Rasio Pertumbuhan
2018	Rp342.957.213.726	Rp388.014.897.386	-Rp 45.057.683.660	-12%
2019	Rp395.431.863.402	Rp342.957.213.726	Rp 52.474.649.676	15%
2020	Rp451.543.582.894	Rp395.431.863.402	Rp 56.111.719.492	14%

Sumber Data Sekunder Diolah

Berdasarkan tabel hasil analisis tersebut diketahui kinerja keuangan pemerintah kabupaten Boyolali berdasarkan rasio pertumbuhan PAD. Tahun 2018 mengalami pertumbuhan negatif sedangkan di tahun 2019 dan 2020 mengalami pertumbuhan positif. Di tahun 2018 Lain-lain PAD Yang Sah mengalami penurunan yang signifikan sebesar 32% atau (Rp. 81.283.436.770), angka tersebut bersumber dari selisih realisasi lain-lain

PAD yang sah tahun 2018 dikurangi 2017, penurunan terbesar bersumber dari penerimaan dana bos karna turunnya alokasi dari pemerintah pusat yang dimana di tahun 2018 tidak ada dana yang terealisasi terkait dana bos. Di tahun 2019 pendapatan retribusi daerah naik sebesar 31% atau Rp.4.999.105.481, angka tersebut bersumber dari selisih realisasi retribusi daerah tahun 2019 dikurangi 2018, peningkatan terbesar bersumber dari retribusi jasa umum karna peningkatan pelayanan pemerintah khususnya pada pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi. Dan di tahun 2020 pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan naik sebesar 33% atau Rp.4.571.712.979, angka tersebut bersumber dari selisih realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2020 dikurangi 2019 peningkatan terbesar bersumber dari penerimaan Bagian laba atas penyertaan modal pada bank Jateng.

## 2. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian menggambarkan sebuah kondisi kontribusi Pendapatan Asli daerah atas pendapatan daerah kabupaten Boyolali, dimana dilihat dari kemandirian pemerintah dalam menghasilkan pendapatan daerah, adapun hasil analisis rasio kemandirian kabupaten Boyolali sebagai berikut :

**Tabel 3.2 Hasil Analisis Rasio Kemandirian**

Tahun	Realisasi Pendapatan (PAD)	Realisasi Pendapatan Transfer	Rasio	Kreteria
2018	Rp. 342.957.213.726	Rp. 1.803.665.066.405	19 %	Rendah Sekali
2019	Rp. 395.431.863.402	Rp. 1.872.257.957.642	21 %	Rendah Sekali
2020	Rp. 451.543.582.894	Rp. 1.836.521.334.533	25 %	Rendah Sekali

Sumber Data Sekunder Diolah

Berdasarkan tabel hasil analisis tersebut diketahui kinerja keuangan pemerintah kabupaten Boyolali berdasarkan rasio kemandirian selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018 dengan kemandirian 19% meningkat ditahun 2019 menjadi 21% dan ditahun 2020 meningkat 25%. Tetapi jika hasil rasio kemandirian tersebut jika dilihat pada pedoman tingkat kemandirian menurut Kepmendagri No. 690.900.327(1996) kemampuan pemerintah kabupaten Boyolali tahun 2018 sampai dengan 2020 dalam hal kemandirian untuk memperoleh PAD dikategorikn masih sangat rendah sekali. Kondisi tersebut menggambarkan kabupaten Boyolali tingkat ketergantungan kepada pendapatan tarsfer khususnya pada pendapatan transfer pemerintah pusat sangat tinggi. Jika dilihat dari pola hubungan antara pemerintah pusat, dengan pemerintah daerah dikategorikan sebagai pola hubungan yang instruktif dimana peran pemerintah lebih dominan dari pada peran dari pemerintah daerah sendiri.

### 3. Rasio Efektifitas dan Efisiensi PAD

#### a. Rasio Efektifitas

Rasio efektifitas merupakan gambaran kemampuan pemerintah kabupaten Boyolali dalam merealisasikan PAD yang telah dianggarkan sebelumnya apakah sudah pas, lebih atau kurang. Adapun hasil dari analisis rasio efektifitas PAD kabupaten Boyolali sebagai berikut:

**Tabel 3.3 Hasil Analisis Rasio efektifitas**

Tahun	Realiasi (PAD)	Anggaran PAD	Rasio Efektifitas	Kreteria
2018	Rp. 342.957.213.726	Rp. 329.616.583.000	104 %	Sangat Efektif
2019	Rp. 395.431.863.402	Rp. 364.528.449.000	108 %	Sangat Efektif
2020	Rp. 451.543.582.894	Rp. 436.378.240.000	103 %	Sangat Efektif

Sumber Data Sekunder Diolah

Berdasarkan tabel hasil analisis tersebut diketahui kinerja keuangan pemerintah kabupaten Boyolali berdasarkan rasio efektivitas PAD. Pada tahun 2018 sebesar 104%, dikategorikan sangat efektif meningkat ditahun 2019 sebesar 108% dikategorikan sangat efektif dan ditahun 2020 mengalami sedikit penurunan menjadi 103%, walaupun ditahun 2020 mengalami penurunan tingkat efisiensi PAD pemerintah Boyolali masih dikategorikan sangat efektif. Tahun 2018 tingkat efektifitas paling tinggi adalah pendapatan pajak daerah sebesar 123%, dimana dengan anggaran sebesar Rp.109.350.000.000, pemerintah daerah kabupaten Boyolali dapat merealisasikan sebesar 134.430.549.029, kedua angka tersebut diambil dari realisasi dan anggaran pajak daerah tahun 2018 pada LRA. Ditahun 2019 tingkat efektifitas paling tinggi adalah pendapatan retribusi daerah sebesar 119% dimana dengan anggaran sebesar Rp.17.714.669.000, pemerintah daerah kabupaten Boyolali dapat merealisasikan sebesar Rp.21.008.974.161, kedua angka tersebut diambil dari realisasi dan anggaran retribusi daerah tahun 2019 pada LRA Sedangkan ditahun 2020 tingkat efisiensi paling tinggi adalah pendapatan retribusi daerah sebesar 142% dimana dengan anggaran Rp.12.039.074.000, pemerintah kabupaten Boyolali dapat merealisasikan sebesar Rp.17.102.684.753, kedua angka

tersebut diambil dari realisasi dan anggaran retribusi daerah tahun 2020 pada LRA. Hal tersebut menggambarkan kontribusi masyarakat dalam dalam pembayaran pajak sangat tinggi serta pelayanan yang diberikan pemerintah sudah cukup baik.

Dalam menilai kinerja keuangan pemerintah tidak hanya melihat dari tingkat efektifitas dalam merealisasikan tapi juga mempertimbangkan atau memperhitungkan biaya yang harus dikeluarkan dalam rangka merealisasikan pendapatan asli daerah dengan melakukan analisis efisiensi PAD..

b. Rasio Efisiensi PAD

Dengan menggunakan rasio efisiensi pemerintah daerah kabupaten menggambarkan bagaimana pemerintah Boyolali mengeluarkan biaya untuk dapat merealisasikan Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya. Adapun hasil analisis rasio efisiensi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

**Tabel 3.4 Hasil Analisis Rasio Efisiensi**

Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi PAD	Rasio Efisiensi	Kreteria
2018	Rp. 1.859.493.312.917	Rp. 342.957.213.726	542%	Tidak Efisien
2019	Rp. 1.997.991.916.522	Rp. 395.431.863.402	505%	Tidak Efisien
2020	Rp. 1.972.664.326.304	Rp. 451.543.582.894	437%	Tidak Efisien

Sumber Data Sekunder Diolah

Berdasarkan tabel data diatas kinerja keuangan pemerintah kabupaten Boyolali berdasarkan analisis rasio efisiensi selalu mengalami penurunan setiap tahunnya, ditahun 2018 tingkat efisiensi sebesar 542%, turun di tahun 2019 sebesar 505% dan ditahun 2020 turun sebesar 417%. Jika dilihat pada pedoman tingkat efektifitas menurut

Kepmendagri No 690.900.327 (1996) tingkat efesiensi kabupaten Boyolali dikategorikan tidak efisien, karena biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan Pendapatan Asli Daerah masih sangat tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwasannya pemerintah daerah kabupaten boyolali belum bisa menekan biaya yang harus dikeluarkan untuk merealisasikan PAD.

#### 4. Rasio Pertumbuhan Belanja

Pertumbuhan belanja merupakan gambaran secara umum kondisi perkembangan belanja dari tahun ketahun, dimana akan muncul kecenderungan pertumbuhan positif atau naik dan negatif atau turun, adapun hasil dari analisis rasio pertumbuhan belanja kabupaten Boyolali sebagai berikut:

**Tabel 3.5 Hasil Analisis Pertumbuhan Belanja**

Tahun	Realiasi Belanja Tahun Berjalan	Realisasi Belanja Tahun Sebelumnya	Naik (Turun)	Rasio Pertumbuhan
2018	Rp. 1.859.493.312.917	Rp. 1.787.133.997.452	Rp. 72.359.315.465	4 %
2019	Rp. 1.997.991.916.522	Rp. 1.859.493.312.917	Rp. 138.498.603.605	<b>7 %</b>
2020	Rp. 1.972.664.326.304	Rp. 1.997.991.916.522	-Rp. 25.327.590.218	-1 %

Sumber Data Sekunder Diolah

Berdasarkan tabel hasil analisis tersebut diketahui kinerja keuangan pemerintah kabupaten Boyolali berdasarkan analisis pertumbuhan belanja. Pada tahun 2018 sampai dengan 2019 mengalami pertumbuhan positif sedangkan di tahun 2020 mengalami pertumbuhan negatif. Dikarenakan pada tahun 2018 meningkatkan belanja modal sebesar 19% atau Rp. 78.822.340.560 angka tersebut bersumber dari selisih realisasi belanja modal tahun anggaran 2018 dikurangi 2017, peningkatan terbesar terjadi pada belanja modal tanah



kebutuhan untuk penggandaan bangunan gedung permintaan terbesar dari RSUD Waras Wiris. Ditahun 2019 terjadi peningkatan sangat signifikan pada belanja takterduga sebesar 72805% atau Rp.665.277.140 angka tersebut bersumber dari selisih realisasi belanja tak terduga tahun anggaran 2019 dikurangi 2018, hal tersebut terjadi karena keperluan penggantian pipa air bersih beserta asesorisnya, karena terjadi bencana kebakaran gunung merbabu pada tahun 2019. Ditahun 2020 belanja modal mengalami penurunan drastis sebesar -24% atau (Rp.125.482.885.375) angka tersebut bersumber dari selisih realisasi belanja modal tahun anggaran 2020 dikurangi 2019, penurunan terbesar bersumber dari belanja modal-pengadaan aset tak berwujud karena ditahun sebelumnya sebagian sudah terealisasi, akan tetapi peningkatan sangat signifikan terjadi pada belanja tak terduga sebesar 21622% atau Rp.143.846.295.385 angka tersebut bersumber dari selisih realisasi belanja tak terduga tahun anggaran 2020 dikurangi 2019 karena pemfokusan pemerintah kabupaten Boyolali dalam penanggulangan *covid-19* dan simulasi bencana gunung merapi pada tahun 2020. Pertumbuhan belanja yang terjadi masih rasional dan dapat dipertanggung jawabkan mengingat faktor external yang terjadi tidak dapat diprediksi yang membuat anggaran membengkak dan belanja yang dikeluarkan sangat besar.

#### 5. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan gambaran bagaimana pemerintah daerah kabupaten Boyolali dalam melakukan belanja apakah pemerintah dapat menghemat dana atau tidak, dalam mengukur efisiensi belanja ini menurut

Mahmudi (2019) tidak ada standar baku yang dianggap baik dalam rasio ini tetapi bersifat relatif yang dimana pengukuran dapat bercermin dari tahun sebelumnya, Adapun hasil dari analisis rasio efisiensi belanja kabupaten Boyolali sebagai berikut:

**Tabel 3.6 Hasil Analisis Efisiensi Belanja**

Tahun	Realiasi Belanja	Anggaran Belanja	Kinerja Rasio Efektifitas	Kreteria
2018	1.977.942.404.000,00	1.859.493.312.917	94%	Efisien
2019	1.997.991.916.522,00	2.080.212.215.000	96,%	Efisien
2020	1.972.664.326.304,00	2.103.106.716.000	94%	Efisien

Sumber Data Sekunder Diolah

Dari hasil data diatas diketahui kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Boyolali berdasarkan rasio efesiensi belanja, menunjukkan suatu perkembangan efisiensi yang fluktuatif dimana menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Pada tahun 2018 tingkat efisiensi belanja sebesar 94% dikategorikan efisien, naik ditahun 2019 sebesar 96% dikategorikan efisien dan di 2020 turun tingkat efisiensi mejadi 94% juga dikategorikan efisien, karena realisasi belanja daerah kabupaten Boyolali tidak pernah melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Walaupun tingkat efisiensi kabupaten Boyolali berada di kategori efisien namun hasil ini tidak berarti kinerja keuangan kabupaten Boyolali dalam melakukan perencanaan anggaran dan realisasi dengan baik, selisih dibeberapa belanja justru perencanaan anggaran yang kurang tepat membuat beberapa belanja tidak terealisasi dengan baik

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Boyolali tahun 2018 sampai dengan 2020, jika dinilai dari tingkat pertumbuhan PAD Kabupaten Boyolali berada di pertumbuhan yang positif atau selalu meningkat setiap tahunnya walaupun tahun 2018 mengalami pertumbuhan negatif. Kemandirian dan efisiensi PAD kabupaten Boyolali harus menjadi perhatian penting karena pasalnya, tingkat kemandirian Kabupaten Boyolali terhadap kontribusi dalam pendapatan daerah setiap tahunnya meningkat namun jika dilihat dari pedoman Kepmendagri No 690.900.327 (1996) tingkat kemandirian Kabupaten Boyolali masih rendah. Tingkat efektifitas dalam menghasilkan PAD sangat efektif namun jika dilihat dari tingkat efisiensi dalam menghasilkan PAD sangat kurang efisien kabupaten Boyolali dalam menekan biaya dalam merealisasikan PAD. Pertumbuhan belanja Kabupaten Boyolali cenderung naik tapi masih rasional dan dapat dipertanggung jawabkan. Sedangkan efisiensi belanja kabupaten boyolali menunjukkan rasio yang efisien dalam merealisasikan belanja setiap tahunnya

#### **4.2 Saran**

1. Jika dilihat dari hasil analisi kinerja kabupaten Boyolali, sebaiknya pemerintah dapat mengoptimalkan potensi-potensi asli daerah guna meningkatkan kemandirian dalam merealisasikan pendapatan daerah dan meminimalisir ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat

2. Sebaiknya pemerintah daerah kabupaten Boyolali menyelenggarakan pelatihan kepada Aparatur Sipil Negri guna merumuskan anggaran agar kinerja pemerintah dalam perumusan anggaran dengan cermat
3. Lebih mengutamakan belanja yang bersifat membangun untuk merealisasikan PAD agar memberikan manfaat yang baik untuk pemerintah dalam jangka panjang serta dapat menekan belanja yang kurang relevan dalam menghasilkan PAD



## DAFTAR PUSTAKA

- Fahmi , I. (2016). *Analisis Kinerja Keuangan: Panduan Bagi Akademisi, Manajer, Dan Investor Untuk Menilai Dan Menganalisis Bisnis Dari Aspek Keuangan*. Bandung: ALFABETA.
- Farida, A., & Maulana Nugraha , R. (2019). *ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG , 11*, 18-19.
- Kartopawiro, S., & Susanto, y. (2018). *ANALISIS TERHADAP KINERJA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI WARAS .*
- Kepmendagri No 690.900.327 Tahun 1996. (n.d.). *TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA KEUANGAN .*
- Mahmudi. (2015). *Manajemen kinerja Sektor Publik, Edisi 3*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Edisi 4*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK .* Yogyakarta: Andi.
- Nugroho , S. (2019). In *ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-EKS KARESIDENAN SURAKARTA TAHUN 2014-2018*. SURAKARTA.
- Peraturan Bupati No 50 Tahun 2018. (n.d.). *TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI*.
- Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018. (n.d.). *TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI. SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. (n.d.). *TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN*.
- Pramono, J. (2014). *ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN . 30*.
- PSAP N0. 01. (n.d.). *PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. (n.d.). *Tentang Pemerintahan Daerah*.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018



**PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

NO.	URAIAN	Ref	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	(%)	REALISASI 2017
4	<b>PENDAPATAN - LRA</b>	<b>5.1.a</b>	2.222.728.392.000,00	2.227.780.710.062,00	100,23	2.176.496.270.254,00
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA</b>	<b>5.1.a.1</b>	329.616.583.000,00	342.957.213.726,00	104,05	388.014.897.386,00
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	5.1.a.1.a	109.350.000.000,00	134.430.549.029,00	122,94	103.289.100.380,00
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	5.1.a.1.b	16.121.460.000,00	16.089.868.680,00	99,80	14.753.885.679,00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	5.1.a.1.c	19.226.564.000,00	18.987.096.778,00	98,75	15.138.775.318,00
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	5.1.a.1.d	184.918.559.000,00	173.449.699.239,00	93,80	254.733.136.009,00
4.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER - LRA</b>	<b>5.1.a.2</b>	1.803.954.643.000,00	1.803.665.066.405,00	99,98	1.775.272.436.868,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	5.1.a.2	1.437.809.538.000,00	1.438.528.619.300,00	100,05	1.354.438.480.868,00
4.2.1.1	Bagi Hasil Pajak - LRA	5.1.a.2	45.533.498.000,00	41.487.198.561,00	91,11	43.660.919.971,00
4.2.1.1	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	5.1.a.2	1.544.348.000,00	1.413.096.043,00	91,50	1.543.131.977,00
4.2.1.1	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	5.1.a.2	1.014.602.019.000,00	1.014.602.019.000,00	100,00	1.014.602.019.000,00
4.2.1.1	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	5.1.a.2	376.129.673.000,00	381.026.305.696,00	101,30	294.632.409.920,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	5.1.a.2	216.498.474.000,00	216.498.474.000,00	100,00	261.922.667.000,00
4.2.2.1	Dana Penyesuaian - LRA	5.1.a.2	216.498.474.000,00	216.498.474.000,00	100,00	261.922.667.000,00
4.2.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	5.1.a.2	128.357.241.000,00	127.480.524.105,00	99,32	123.876.899.000,00
4.2.2.3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	5.1.a.2	128.357.241.000,00	127.480.524.105,00	99,32	123.876.899.000,00
4.2.4	Bantuan Keuangan - LRA	5.1.a.2	21.289.390.000,00	21.157.449.000,00	99,38	35.034.390.000,00
4.2.4.4	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	5.1.a.2	21.289.390.000,00	21.157.449.000,00	99,38	35.034.390.000,00
4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA</b>	<b>5.1.a.3</b>	89.157.166.000,00	81.158.429.931,00	91,03	13.208.936.000,00
4.3.1	Pendapatan Hibah - LRA	5.1.a.3	89.157.166.000,00	81.158.429.931,00	91,03	13.208.936.000,00
5	<b>BELANJA</b>	<b>5.1.b</b>	1.977.942.404.000,00	1.859.493.312.917,00	94,01	1.787.133.997.452,00
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>5.1.b.1</b>	1.454.596.942.000,00	1.360.520.316.489,00	93,54	1.366.155.429.830,00
5.1.1	Belanja Pegawai	5.1.b.1.a	926.102.447.000,00	876.508.444.540,00	94,64	879.903.256.401,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.1.b.1.b	470.504.830.000,00	433.961.804.449,00	92,24	434.054.107.439,00
5.1.5	Belanja Hibah	5.1.b.1.c	42.094.665.000,00	34.486.830.000,00	81,93	31.007.099.990,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5.1.b.1.d	15.895.000.000,00	15.563.237.500,00	97,91	21.190.966.000,00
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>5.1.b.2</b>	521.345.462.000,00	498.972.083.904,00	95,71	420.149.743.344,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	5.1.b.2.a	61.491.572.000,00	61.433.893.000,00	99,91	38.847.552.540,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.b.2.b	94.411.029.700,00	88.365.912.185,00	93,60	64.761.380.735,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.b.2.c	187.904.821.800,00	178.440.132.849,00	94,96	113.187.593.467,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.b.2.d	151.966.772.000,00	146.198.275.346,00	96,20	166.288.326.060,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.b.2.e	24.480.066.500,00	23.508.175.024,00	96,03	35.916.531.385,00
5.2.6	Belanja Modal-Pengadaan Aset Tak Berwujud	5.1.b.2.f	1.091.200.000,00	1.025.695.500,00	94,00	1.148.359.157,00
5.3	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>5.1.b.3</b>	2.000.000.000,00	912.524,00	0,05	828.824.278,00
5.3.1	Belanja Tak Terduga	5.1.b.3	2.000.000.000,00	912.524,00	0,05	828.824.278,00
6	<b>TRANSFER</b>	<b>5.1.c</b>	349.215.132.000,00	343.619.449.335,00	98,40	361.294.357.585,00
6.1	<b>TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN</b>	<b>5.1.c</b>	18.510.930.000,00	14.953.727.000,00	80,78	5.841.497.000,00
6.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.1.c	16.338.005.000,00	12.894.520.000,00	78,92	4.935.905.000,00
6.1.2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.1.c	2.172.925.000,00	2.059.207.000,00	94,77	905.592.000,00
6.2	<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>	<b>5.1.c</b>	330.704.202.000,00	328.665.722.335,00	99,38	355.452.860.585,00
6.2.1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.c	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.1.c	329.643.333.000,00	327.704.854.000,00	99,41	354.491.992.250,00
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.1.c	960.869.000,00	960.868.335,00	100,00	960.868.335,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>5.1.d</b>	(104.429.144.000,00)	24.667.947.810,00	(23,62)	28.067.915.217,00
7	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>5.1.e</b>				
7.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>5.1.e</b>	153.980.144.000,00	164.314.295.216,50	106,71	153.343.928.335,50
7.1.1	Penggunaan SILPA	5.1.e	153.719.030.000,00	153.553.180.773,50	99,89	143.082.813.902,50
7.1.4	Pinjaman Dalam Negeri	5.1.e	0,00	10.500.000.000,00	0,00	9.500.000.000,00
7.1.5	Penerimaan Kembali Piutang	5.1.e	261.114.000,00	261.114.443,00	100,00	761.114.433,00
7.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>5.1.e</b>	49.551.000.000,00	42.551.000.000,00	85,87	27.692.812.633,00
7.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.1.e	35.051.000.000,00	28.051.000.000,00	80,03	24.670.167.821,00
7.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	5.1.e	9.500.000.000,00	9.500.000.000,00	100,00	0,00
7.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.e	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	3.000.000.000,00
7.2.8	Pengembalian Titipan Uang Jaminan	5.1.e	0,00	0,00	0,00	22.644.812,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>5.1.e</b>	104.429.144.000,00	121.763.295.216,50	116,60	125.651.115.702,50
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>5.1.f</b>	0,00	146.431.243.026,50	0,00	153.719.030.919,50



Lampiran 2 : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Tahun Anggaran 2019



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

NO. URUT	URAIAN	Ref	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)	REALISASI 2018
4	<b>PENDAPATAN - LRA</b>		2.330.495.203.000,00	2.357.487.210.573,00	101,16	2.227.780.710.062,00
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA</b>	<b>5.1.a.1</b>	364.528.449.000,00	395.431.863.402,00	108,48	342.957.213.726,00
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	5.1.a.1.a	132.800.000.000,00	149.666.539.729,00	112,70	134.430.549.029,00
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	5.1.a.1.b	17.714.669.000,00	21.088.974.161,00	119,05	16.089.868.680,00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	5.1.a.1.c	13.950.961.000,00	13.970.406.527,00	100,14	18.987.096.778,00
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	5.1.a.1.d	200.062.819.000,00	210.705.942.985,00	105,32	173.449.699.239,00
4.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER - LRA</b>	<b>5.1.a.2</b>	1.880.918.382.000,00	1.872.257.957.642,00	99,54	1.803.665.066.405,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	5.1.a.2	1.451.998.543.000,00	1.436.635.314.225,00	98,94	1.438.528.619.300,00
4.2.1.1	Bagi Hasil Pajak - LRA	5.1.a.2	43.166.440.000,00	36.177.413.491,00	83,81	41.487.198.561,00
4.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	5.1.a.2	2.377.276.000,00	1.414.243.229,00	59,49	1.413.096.043,00
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	5.1.a.2	1.045.669.922.000,00	1.045.669.922.000,00	100,00	1.014.602.019.000,00
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	5.1.a.2	360.784.905.000,00	353.373.735.505,00	97,95	381.026.305.696,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	5.1.a.2	266.142.285.000,00	266.142.285.000,00	100,00	216.498.474.000,00
4.2.2.3	Dana Penyesuaian - LRA	5.1.a.2	266.142.285.000,00	266.142.285.000,00	100,00	216.498.474.000,00
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	5.1.a.2	127.322.554.000,00	134.175.358.417,00	105,38	127.480.524.105,00
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	5.1.a.2	127.322.554.000,00	134.175.358.417,00	105,38	127.480.524.105,00
4.2.4	Bantuan Keuangan - LRA	5.1.a.2	35.455.000.000,00	35.305.000.000,00	99,58	21.157.449.000,00
4.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	5.1.a.2	35.455.000.000,00	35.305.000.000,00	99,58	21.157.449.000,00
4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA</b>	<b>5.1.a.3</b>	85.048.372.000,00	89.797.389.529,00	105,58	81.158.429.931,00
4.3.1	Pendapatan Hibah - LRA	5.1.a.3	85.048.372.000,00	89.797.389.529,00	105,58	81.158.429.931,00
5	<b>BELANJA</b>		2.080.212.215.000,00	1.997.991.916.522,00	96,05	1.859.493.312.917,00
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>5.1.b.1</b>	1.523.194.262.000,00	1.466.732.795.862,00	96,29	1.360.520.316.489,00
5.1.1	Belanja Pegawai	5.1.b.1.a	913.647.765.000,00	898.026.621.720,00	98,29	876.508.444.540,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.1.b.1.b	555.152.262.000,00	514.875.231.142,00	92,74	433.961.804.449,00
5.1.5	Belanja Hibah	5.1.b.1.c	39.865.235.000,00	39.492.443.000,00	99,06	34.486.830.000,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5.1.b.1.d	14.529.000.000,00	14.338.500.000,00	98,69	15.563.237.500,00
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>5.1.b.2</b>	555.017.953.000,00	530.593.843.520,00	95,60	498.972.083.904,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	5.1.b.2.a	35.392.102.000,00	31.599.383.176,00	89,28	61.433.893.000,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.b.2.b	98.973.303.400,00	88.591.280.272,00	89,51	88.365.912.185,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.b.2.c	189.791.686.000,00	184.815.082.330,00	97,38	178.440.132.849,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.b.2.d	210.764.596.000,00	206.739.374.708,00	98,09	146.198.275.346,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.b.2.e	20.096.265.600,00	18.848.723.034,00	93,79	24.533.870.524,00
5.3	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>5.1.b.3</b>	2.000.000.000,00	665.277.140,00	33,26	912.524,00
5.3.1	Belanja Tak Terduga	5.1.b.3	2.000.000.000,00	665.277.140,00	33,26	912.524,00
6	<b>TRANSFER</b>	<b>5.1.c</b>	388.209.346.000,00	383.609.948.217,00	98,82	343.619.449.335,00
6.1	<b>TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN</b>	<b>5.1.c</b>	15.051.567.000,00	11.021.120.500,00	73,22	14.953.727.000,00
6.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.1.c	13.345.394.000,00	9.468.866.000,00	70,95	12.894.520.000,00
6.1.2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.1.c	1.706.173.000,00	1.552.254.500,00	90,98	2.059.207.000,00
6.2	<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>	<b>5.1.c</b>	373.157.779.000,00	372.588.827.717,00	99,85	328.665.722.335,00
6.2.1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.c	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.1.c	372.046.910.000,00	371.609.249.000,00	99,88	327.704.854.000,00
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.1.c	1.110.869.000,00	979.578.717,00	88,18	960.868.335,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		<b>(137.926.358.000,00)</b>	<b>(24.114.654.166,00)</b>	<b>17,48</b>	<b>24.667.947.810,00</b>
7	<b>PEMBIAYAAN</b>					
7.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>5.1.e</b>	159.262.358.000,00	156.494.100.105,00	98,26	164.314.295.216,50
7.1.1	Penggunaan SilPA	5.1.e	146.431.244.000,00	146.262.985.662,00	99,89	153.553.180.773,50
7.1.4	Pinjaman Dalam Negeri	5.1.e	10.500.000.000,00	7.900.000.000,00	75,24	10.500.000.000,00
7.1.5	Penerimaan Kembali Pinjaman	5.1.e	2.331.114.000,00	2.331.114.443,00	100,00	261.114.443,00
7.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>5.1.e</b>	21.336.000.000,00	28.436.000.000,00	133,28	42.551.000.000,00
7.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.1.e	10.836.000.000,00	10.836.000.000,00	100,00	28.051.000.000,00
7.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	5.1.e	10.500.000.000,00	17.600.000.000,00	167,62	9.500.000.000,00
7.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.e	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>		<b>137.926.358.000,00</b>	<b>128.058.100.105,00</b>	<b>92,85</b>	<b>121.763.295.216,50</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>		<b>0,00</b>	<b>103.943.445.939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.431.243.026,50</b>

Boyolali, 31 Desember 2019

BUPATI BOYOLALI

SENO SAMODRO

Lampiran 3 : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Tahun Anggaran 2020



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2020 DAN 2019

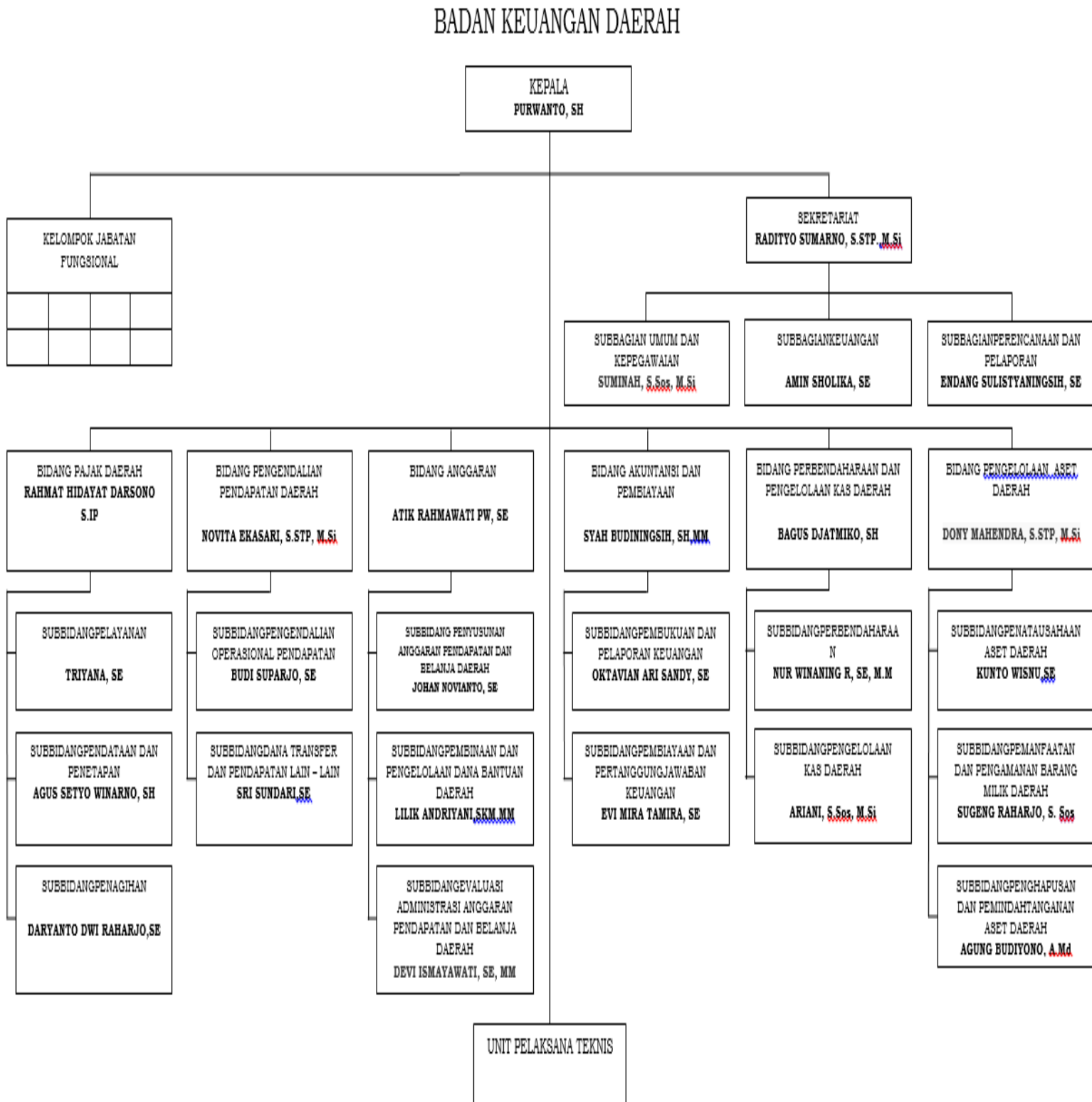
NO. URUT	URAIAN	Ref	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
4	<b>PENDAPATAN - LRA</b>		2.379.198.400.000,00	2.382.403.220.150,00	100,13	2.357.487.210.573,00
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA</b>	<b>5.1.a.1</b>	436.378.240.000,00	451.543.582.894,00	103,48	395.431.863.402,00
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	5.1.a.1.a	133.575.815.000,00	140.732.284.319,00	105,36	149.666.539.729,00
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	5.1.a.1.b	12.039.074.000,00	17.102.684.753,00	142,06	21.088.974.161,00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	5.1.a.1.c	14.950.961.000,00	18.542.139.505,50	124,02	13.970.406.527,00
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	5.1.a.1.d	275.812.390.000,00	275.166.474.316,50	99,77	210.705.942.985,00
4.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER - LRA</b>	<b>5.1.a.2</b>	1.852.886.706.000,00	1.836.521.334.533,00	99,12	1.872.257.957.642,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	5.1.a.2.a	1.364.509.303.000,00	1.356.374.607.571,00	99,40	1.436.635.314.225,00
4.2.1.1	Bagi Hasil Pajak - LRA	5.1.a.2.a	41.232.980.000,00	41.339.764.573,00	100,26	36.177.413.491,00
4.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	5.1.a.2.a	2.056.866.000,00	1.925.031.574,00	93,59	1.414.243.229,00
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	5.1.a.2.a	966.489.944.000,00	956.428.556.000,00	98,96	1.045.669.922.000,00
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	5.1.a.2.a	354.729.513.000,00	356.681.255.424,00	100,55	353.373.735.505,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	5.1.a.2.b	323.859.637.000,00	323.859.637.000,00	100,00	266.142.285.000,00
4.2.2.3	Dana Penyesuaian - LRA	5.1.a.2.b	323.859.637.000,00	323.859.637.000,00	100,00	266.142.285.000,00
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	5.1.a.2.c	130.829.315.000,00	122.992.708.962,00	94,01	134.175.358.417,00
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	5.1.a.2.c	130.829.315.000,00	122.992.708.962,00	94,01	134.175.358.417,00
4.2.4	Bantuan Keuangan - LRA	5.1.a.2.d	33.688.451.000,00	33.294.381.000,00	98,83	35.305.000.000,00
4.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	5.1.a.2.d	33.688.451.000,00	33.294.381.000,00	98,83	35.305.000.000,00
4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA</b>	<b>5.1.a.3</b>	89.933.454.000,00	94.338.302.723,00	104,90	89.797.389.529,00
4.3.1	Pendapatan Hibah - LRA	5.1.a.3	89.933.454.000,00	94.338.302.723,00	104,90	89.797.389.529,00
5	<b>BELANJA</b>		2.103.106.716.000,00	1.972.664.326.304,00	93,80	1.997.991.916.522,00
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>5.1.b.1</b>	1.480.930.168.000,00	1.423.041.795.634,00	96,09	1.466.732.795.862,00
5.1.1	Belanja Pegawai	5.1.b.1.a	883.726.790.000,00	863.836.702.593,00	97,75	898.026.621.720,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.1.b.1.b	500.319.274.000,00	463.985.975.237,00	92,74	514.875.231.142,00
5.1.5	Belanja Hibah	5.1.b.1.c	81.536.554.000,00	80.007.467.804,00	98,12	39.492.443.000,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5.1.b.1.d	15.347.550.000,00	15.211.650.000,00	99,11	14.338.500.000,00
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>5.1.b.2</b>	450.292.480.000,00	405.110.958.145,00	89,97	530.593.843.520,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	5.1.b.2.a	46.932.836.000,00	46.198.714.373,00	98,44	31.599.383.176,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.b.2.b	199.556.335.250,00	165.338.874.253,00	82,85	88.591.280.272,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.b.2.c	83.014.286.250,00	75.955.828.116,00	91,50	184.815.082.330,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.b.2.d	102.005.423.000,00	100.379.862.388,00	98,41	206.739.374.708,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.b.2.e	18.675.599.500,00	17.229.979.015,00	92,26	16.653.057.734,00
5.2.6	Belanja Modal-Pengadaan Aset Tak Berwujud	5.1.b.2.f	108.000.000,00	7.700.000,00	7,13	2.195.665.300,00
5.3	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>5.1.b.3</b>	171.884.068.000,00	144.511.572.525,00	84,08	665.277.140,00
5.3.1	Belanja Tak Terduga	5.1.b.3	171.884.068.000,00	144.511.572.525,00	84,08	665.277.140,00
6	<b>TRANSFER</b>	<b>5.1.c</b>	368.112.528.000,00	367.141.190.721,00	99,74	383.609.948.217,00
6.1	<b>TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN</b>	<b>5.1.c.1</b>	12.615.026.000,00	11.993.185.240,00	95,07	11.021.120.500,00
6.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.1.c.1.a	11.357.582.000,00	10.948.287.463,00	96,40	9.468.866.000,00
6.1.2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.1.c.1.b	1.257.444.000,00	1.044.897.777,00	83,10	1.552.254.500,00
6.2	<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>	<b>5.1.c.2</b>	355.497.502.000,00	355.148.005.481,00	99,90	372.588.827.717,00
6.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.1.c.2.a	354.479.502.000,00	354.131.002.000,00	99,90	371.609.249.000,00
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.1.c.2.b	1.018.000.000,00	1.017.003.481,00	99,90	979.578.717,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>5.1.d</b>	(92.020.844.000,00)	42.597.703.125,00	(46,29)	(24.114.654.166,00)
7	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>5.1.e</b>				
7.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>5.1.e.1</b>	106.204.560.000,00	108.946.985.388,00	102,58	156.494.100.105,00
7.1.1	Penggunaan SILPA	5.1.e.1.a	103.943.446.000,00	103.935.870.945,00	99,99	146.262.985.662,00
7.1.4	Pinjaman Dalam Negeri	5.1.e.1.b	0,00	2.750.000.000,00	0,00	7.900.000.000,00
7.1.5	Penerimaan Kembali Piutang	5.1.e.1.c	2.261.114.000,00	2.261.114.443,00	100,00	2.331.114.443,00
7.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>5.1.e.2</b>	14.183.716.000,00	17.733.716.000,00	125,03	28.436.000.000,00
7.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.1.e.2.a	14.183.716.000,00	14.183.716.000,00	100,00	10.836.000.000,00
7.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	5.1.e.2.b	0,00	3.550.000.000,00	0,00	17.600.000.000,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>5.1.f</b>	92.020.844.000,00	91.213.269.388,00	99,12	128.058.100.105,00
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>5.1.g</b>	0,00	133.810.972.513,00	0,00	103.943.445.939,00

BUPATI BOYOLALI,

MOHAMMAD SAID HIDAYAT, SH



Lampiran 4 : Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Badan Keuangan Daerah  
Kabupaten Boyolali



Lampiran 5 : Surat Keterangan Selesai Pelaksanaan Kegiatan Magang



**PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI**  
**BADAN KEUANGAN DAERAH**  
Alamat Komplek Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali  
Jl. Merdeka Timur Telp.(0276)321073, Faks (0276) 322602 Kemiri  
Boyolali 57321, Provinsi Jawa Tengah

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 075 / 3188 / 5.2 / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **PURWANTO, SH**  
NIP. : 19660608 199303 1 007  
Pangkat.Gol.Ruang : Pembina Utama Muda  
Jabatan : Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali

Menerangkan :

NO	NAMA		NIM	JURUSAN/ PRODI	UNIVERSITAS/ SEKOLAH
1	DWI YULIANTO		19212008	D3 AKUNTANSI	UII

Bahwa Mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan Magang Di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali pada tanggal 01 Maret s/d 01 Juni 2022.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Boyolali, 31 Mei 2022

Kepala Badan Keuangan Daerah  
Kabupaten Boyolali

  
**PURWANTO, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660608 199303 1 007

